

Peningkatan Kualitas Hidup Melalui Pembangunan Daerah Yang Berkelanjutan

Agus Redi Susanto

Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Brebes

agusredi1@gmail.com

Jurnal Ultras

Volume 7 Nomor 1 (hlm. 14 – 24)

Info Artikel:

Diterima : 4 Desember 2023

Disetujui : 4 Desember 2023

Kata Kunci : Peningkatan kualitas hidup,
Pembangunan Daerah,
Berkelanjutan.

Keywords : Improved quality of life,
Regional Development,
Sustainable.

Abstrak.

Pada tahun 2022, Kabupaten Brebes di Provinsi Jawa Tengah menghadapi perubahan kepemimpinan dan, sebagai respons terhadap antipasi kekosongan kepemimpinan yang akan terjadi pada tahun 2025. Tujuan penelitian ini adalah memberikan landasan untuk perencanaan dan pembangunan daerah yang berkelanjutan, berfokus pada peningkatan kualitas hidup masyarakat Kabupaten Brebes melalui strategi dan kebijakan yang tepat dan terukur. Pemerintah Kabupaten Brebes menyusun Rencana Pembangunan Daerah (RPD) tahun 2023-2026 sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 70 Tahun 2021. Metode penelitian yang diterapkan melibatkan Analisis Situasi, Wawancara, Kuesioner, Studi Literatur, dan Analisis Kebijakan, dengan melibatkan sampel dari Pejabat Pemerintah Daerah, Masyarakat, serta Ahli dan Akademisi. Temuan penelitian menunjukkan bahwa meskipun Kabupaten Brebes mengalami pertumbuhan ekonomi yang stabil, namun tingkat pengangguran masih tinggi. Oleh karena itu, RPD perlu mengimplementasikan strategi untuk meningkatkan peluang pekerjaan dan mengurangi tingkat pengangguran. Hasil wawancara dengan masyarakat menyoroti kebutuhan peningkatan akses layanan kesehatan dan pendidikan, serta partisipasi aktif dalam pengambilan keputusan lokal, sehingga memberikan implikasi tentang perlunya memberikan prioritas pada sektor kesehatan dan pendidikan dalam RPD, sambil melibatkan partisipasi masyarakat. Analisis lingkungan menunjukkan adanya risiko kerusakan lingkungan, yang menandakan perlunya RPD yang berkelanjutan dengan

strategi pengelolaan air dan limbah yang bijaksana. Analisis kebijakan nasional dan provinsi menunjukkan dukungan untuk pengembangan ekonomi berorientasi pada kerakyatan, dan oleh karena itu, RPD dapat mengoptimalkan dukungan tersebut. Identifikasi kemiskinan menunjukkan tingkat kemiskinan yang tinggi, yang mengindikasikan bahwa RPD perlu fokus pada pemberdayaan ekonomi dan sosial di daerah yang rentan. Pada akhirnya, pembangunan sumber daya manusia perlu difokuskan pada pemerataan akses pendidikan dan kesehatan.

Abstract.

In 2022, Brebes Regency in Central Java Province faces a change in leadership and, in response to the anticipated leadership vacuum that will occur in 2025. The aim of this research is to provide a basis for sustainable regional planning and development, focusing on improving the quality of life of the people of Brebes Regency through appropriate and measurable strategies and policies. The Brebes Regency Government has prepared a Regional Development Plan (RPD) for 2023-2026 in accordance with the provisions of the Republic of Indonesia Minister of Home Affairs Regulation Number 70 of 2021. The research method applied involves Situation Analysis, Interviews, Questionnaires,

Literature Study and Policy Analysis, involving samples from Regional Government Officials, the Community, as well as Experts and Academics. Research findings show that although Brebes Regency is experiencing stable economic growth, the unemployment rate is still high. Therefore, RPD needs to implement strategies to increase employment opportunities and reduce unemployment rates. The results of interviews with the community highlight the need for increased access to health and education services, as well as active participation in local decision making, thus providing implications for the need to prioritize the health and education sectors in the RPD, while involving community participation. Environmental analysis shows the risk of environmental damage, which indicates the need for sustainable RPD with wise water and waste management strategies. Analysis of national and provincial policies shows support for people-oriented economic development, and therefore, RPD can optimize this support. Identification of poverty shows a high level of poverty, which indicates that the RPD needs to focus on economic and social empowerment in vulnerable areas. Ultimately, human resource development needs to focus on equitable access to education and health in order to improve the overall quality of human resources.

PENDAHULUAN

Kabupaten Brebes di Provinsi Jawa Tengah sedang menghadapi transisi kepemimpinan di tahun 2022. Namun, aturan baru menentukan bahwa pemilihan kepala daerah baru akan dilaksanakan pada November 2024, menyebabkan kekosongan kepemimpinan hingga tahun 2025. Hal ini memunculkan kebutuhan untuk merumuskan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2023-2026 sebagai panduan

sementara dalam mengelola pemerintahan dan pembangunan daerah. Brebes, (2022)

Pada tahun-tahun sebelumnya, Brebes telah melaksanakan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) sebelumnya, yang merupakan landasan bagi perencanaan masa depan. Saat ini, terdapat sejumlah permasalahan yang perlu diatasi dalam rangka pembangunan daerah, seperti masalah kemiskinan, perluasan kesenjangan sosial, pembangunan sumber daya manusia, serta upaya membangun

ekonomi yang lebih inklusif dan berorientasi pada masyarakat. Brebes, (2022)

Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 70 Tahun 2021 mewajibkan penyusunan RPD 2023-2026 bagi daerah yang akan menghadapi kekosongan kepemimpinan. Dalam konteks ini, Kabupaten Brebes dan wilayah lain yang mengalami periode transisi kepemimpinan pada tahun 2022 diminta untuk menyusun RPD ini sebagai panduan sementara dalam mengelola pembangunan daerah.

Penelitian dilakukan karena ada sejumlah kekosongan kepemimpinan yang muncul karena jadwal pemilihan kepala daerah yang baru. Oleh karena itu, penelitian RPD 2023-2026 menjadi penting untuk menyediakan pedoman bagi pengelola sementara dalam mengelola daerah dan merencanakan pembangunan. Tujuan utama penelitian adalah untuk merumuskan langkah-langkah strategis dalam mengatasi masalah-masalah pembangunan yang ada, seperti kemiskinan, pengembangan sumber daya manusia, dan pengembangan ekonomi yang berbasis pada partisipasi masyarakat oleh Feliks Arfid Guampe, (2020).

Penelitian yang dilakukan oleh Putri et al., (2023) menunjukkan hasil pengujian, pengaruh Banten yang sebenarnya terhadap pertumbuhan ekonomi adalah Kesehatan dengan koefisien sebesar 5,399. Tingkat kesehatan menjadi variabel yang dominan karena pada awal tahun 2020 pandemi Covid-19 sudah menyebar ke seluruh Indonesia. , termasuk Provinsi Banten. Akibatnya, tingkat kesehatan masyarakat semakin memburuk sehingga menyebabkan menurunnya tingkat pertumbuhan ekonomi dari tahun tersebut hingga saat ini.

Penelitian yang dilakukan oleh Agustinus Maitulung, Anderson G. Kumenaung, (2023) Hal ini menunjukkan

bahwa variabel independen (pengeluaran pemerintah dan pendapatan daerah) secara bersama-sama atau simultan mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap variabel dependen (pertumbuhan ekonomi). Jika belanja pemerintah dan pendapatan asli daerah ditingkatkan maka akan mendorong pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kepulauan Talaud.

Kajian penelitian ini bertujuan untuk menyusun RPD 2023-2026 sebagai panduan sementara dalam mengelola pemerintahan dan pembangunan daerah di Kabupaten Brebes. Dalam konteks ini, penulis menyikapi masalah kekosongan kepemimpinan dengan menyediakan suatu panduan yang berbasis pada data dan fakta terkini serta merumuskan strategi dalam menangani isu-isu utama pembangunan di masa depan.

Dengan pendekatan yang sistematis, studi ini bertujuan untuk memberikan arah kebijakan yang jelas dan strategis dalam mengatasi tantangan pembangunan yang dihadapi oleh Kabupaten Brebes pada periode transisi kepemimpinan ini. Keunikan atau "novelty" dari penelitian ini terletak pada integrasi pendekatan multidisiplin dan partisipatif yang melibatkan berbagai pihak termasuk pejabat pemerintah, masyarakat, dan akademisi. Pendekatan ini tidak hanya menggali isu-isu yang telah teridentifikasi, tetapi juga mendorong keterlibatan aktif dan pemahaman bersama dalam merumuskan solusi berkelanjutan. Novelty ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan penerimaan kebijakan yang dihasilkan, memastikan relevansi dan dampak positifnya terhadap kualitas hidup masyarakat Kabupaten Brebes.

TINJAUAN PUSTAKA

Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2023-2026 sangat memperhatikan beberapa dokumen

perencanaan sektoral pada tingkat nasional dan provinsi. Ini termasuk agenda pembangunan Sustainable Development Goals (SDG's), Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi (RAN PG), Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM), Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN GRK), Grand Design Reformasi Birokrasi, Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) Provinsi Jawa Tengah, Rencana Aksi Daerah (RAD) Pangan dan Gizi Provinsi Jawa Tengah, RAD Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Provinsi Jawa Tengah, RAD Pengurangan Risiko Bencana, Pedoman Pelaksanaan PUG di Jawa Tengah, Strategi Nasional Pencegahan Korupsi, dan Aksi Penanganan Konflik Sosial. Brebes, (2022).

Penelitian yang dilakukan oleh Zakiah et al., (2023) menunjukkan bahwa Provinsi Kalimantan Tengah memiliki potensi dalam beberapa sektor utama yang dapat menjadi fokus pengembangan. Lahan subur mendukung pertanian dan perkebunan, sementara industri kehutanan dan sumber daya alam seperti batubara dan gas memainkan peran penting dalam ekonomi. Keindahan alamnya memberi potensi besar bagi sektor pariwisata. Pembangunan infrastruktur yang memadai juga diperlukan untuk meningkatkan konektivitas wilayah. Menentukan prioritas pembangunan memerlukan pemetaan potensi, analisis mendalam, dan keberlanjutan, serta melibatkan para pemangku kepentingan lokal guna merumuskan rencana pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif di Provinsi Kalimantan Tengah.

Penelitian yang dilakukan oleh Azzaki, (2021) menunjukkan bahwa pengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tidak tercapai oleh variabel pertumbuhan ekonomi, hal ini dikaitkan dengan rendahnya optimalisasi sektor-sektor ekonomi utama seperti

pertanian, industri, perdagangan, dan sektor tradeable lainnya oleh pemerintah di Provinsi Jawa Barat. Akibatnya, pertumbuhan ekonomi daerah secara keseluruhan tidak memberikan dampak yang diharapkan terhadap peningkatan IPM di wilayah tersebut.

Penelitian yang dilakukan oleh Muhaemin, (2021) menunjukkan yaitu apabila pertumbuhan penduduk melalui peningkatan angka kelahiran tidak terkendali, maka proporsi orang yang bergantung pada orang lain secara finansial akan meningkat. Hal ini berdampak pada kemampuan individu yang berusia produktif untuk menginvestasikan dan menabung uang mereka. Selain itu, keberadaan generasi muda (usia 0-14 tahun) dalam sebuah keluarga dapat menyebabkan penurunan partisipasi wanita di pasar kerja karena mereka harus mengurus keluarga.

Penelitian yang dilakukan oleh Priskila & Hukom, (2023) menunjukkan bahwa perencanaan dan alokasi anggaran yang terencana dengan baik sangat penting dalam memastikan program pembangunan berjalan tepat dan efisien. Pendekatan ini melibatkan partisipasi masyarakat, fokus pada solusi masalah, penentuan prioritas pembangunan, pemanfaatan teknologi, pengawasan dan evaluasi, serta kerja sama dengan pihak lain. Dengan menerapkan langkah-langkah ini, pemerintah daerah dapat meningkatkan efektivitas pelaksanaan program pembangunan, meningkatkan keterlibatan masyarakat, dan memperjelas pengelolaan keuangan daerah.

METODE PENELITIAN

Metode Pengambilan sampel dapat dilakukan secara stratified random sampling, di mana populasi dibagi menjadi kelompok-kelompok (strata) seperti pejabat pemerintah, masyarakat, dan ahli. Kemudian, sampel diambil secara acak dari

setiap strata untuk mencapai representasi yang seimbang dari seluruh populasi.

Teknik Analisis Data:

- Analisis data kualitatif dari wawancara dan kuesioner dapat dilakukan dengan metode content analysis.
- Data kuantitatif dari survei dapat dianalisis dengan menggunakan perangkat lunak statistik seperti SPSS.
- Analisis kebijakan dapat melibatkan evaluasi dampak dan analisis perbandingan untuk memahami implikasi dan perbedaan antara kebijakan yang ada.

Kombinasi metode kualitatif dan kuantitatif dapat memberikan pemahaman yang komprehensif terkait kondisi dan kebijakan pembangunan daerah di Kabupaten Brebes.

Wilayah Kabupaten Brebes memiliki variasi topografi yang bervariasi dalam hal ketinggian lahan. Lebih dari seperempat total luas wilayahnya, sekitar 48%, terdiri dari daerah dengan topografi yang sangat rendah. Sebaliknya, wilayah dengan ketinggian yang lebih tinggi, sekitar 11% dari total wilayah, ini mencakup enam kecamatan: Salem, Bantarkawung, Paguyangan, Sirampog, Ketanggungan dan Banjarharjo. Ketinggian di kawasan ini bervariasi. Kecamatan Sirampog merupakan yang tertinggi dengan ketinggian 875 meter di atas permukaan laut, disusul Kecamatan Salem dengan ketinggian 500 meter di atas permukaan laut, dan Kecamatan Paguyangan dengan ketinggian 342 meter di atas permukaan laut. Sedangkan Kecamatan Larangan, Banjarharjo, dan Ketanggungan berada pada ketinggian antara 17 hingga 23 meter di atas permukaan laut. Daerah kabupaten lainnya seperti Losari, Tanjung, Kersana, Bulakamba, Wanasari, Songom, Jatibarang, dan Brebes biasanya terletak pada ketinggian 1 hingga 5 meter di atas

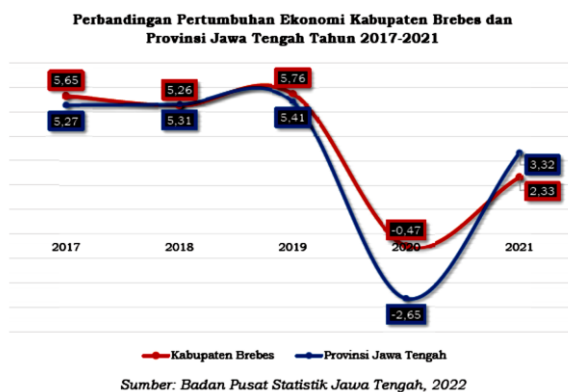
permukaan laut dan mempunyai wilayah pesisir di sebelah utara.

Kabupaten Brebes tergolong wilayah rawan bencana dan kerusakan lingkungan karena karakteristik geologi, hidrologi, dan iklimnya. Terkait gempa bumi, wilayah yang berpotensi terdampak gempa bumi di Kabupaten Brebes diperkirakan berada di wilayah tengah dan selatan, yakni seluas kurang lebih 1.430 hektar di Kecamatan Tonjong, Ketanggungan, dan Bantarkawung. Derajat kegempaan di wilayah ini berkisar antara 0,90 banding 1,20 di zona D intensitas seismik (z), tergantung aktivitas tektonik.

Kawasan rawan longsor seluas 901 hektare ini terletak di Brebes bagian selatan, meliputi wilayah lereng seperti Salem, Bantarkawung, Paguyangan, Sirampog, Tonjong, dan Bumiayu. Sedangkan wilayah rawan banjir seluas 703 hektare meliputi wilayah utara kabupaten, yakni Kecamatan Tanjung, Ketanggungan, Losari, Bulakamba, Wanasari, dan Brebes.

Selama periode 5 tahun perencanaan pembangunan, Kabupaten Brebes mengalami pencapaian pertumbuhan ekonomi yang melampaui target yang telah ditetapkan dari tahun 2017 hingga 2019. Namun, pada tahun 2020, terjadi kontraksi ekonomi sebesar -0,47%. Analisis kinerja ekonomi nasional dan Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2021 menunjukkan perkembangan positif, memberikan harapan bahwa ekonomi Kabupaten Brebes juga mengalami pertumbuhan yang positif pada tahun yang sama. Kondisi positif dalam perekonomian memberikan indikasi bahwa, meskipun dalam masa pandemi yang masih berlangsung, terdapat tanda-tanda pemulihan perlahan. Pentingnya penerapan protokol kesehatan yang konsisten dan peningkatan cakupan vaksinasi dianggap sebagai kunci utama agar pandemi tidak

semakin meluas, serta untuk menuju pada pemulihan kehidupan yang lebih normal.



Perbandingan pertumbuhan ekonomi antara Kabupaten Brebes dan Provinsi Jawa Tengah dari tahun 2017 hingga 2021 dapat dihitung menggunakan rumus pertumbuhan ekonomi. Rumus pertumbuhan ekonomi biasanya dinyatakan dalam persentase perubahan dari tahun ke tahun dan dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Pertumbuhan Ekonomi} = \left(\frac{\text{PDB Tahun Akhir} - \text{PDB Tahun Awal}}{\text{PDB Tahun Awal}} \right) \times 100\%$$

Di mana:

- PDB Tahun Akhir adalah Produk Domestik Bruto pada tahun terkini (misalnya, 2021).
- PDB Tahun Awal adalah Produk Domestik Bruto pada tahun sebelumnya (misalnya, 2017).

Untuk mendapatkan perbandingan antara pertumbuhan ekonomi Kabupaten Brebes dan Provinsi Jawa Tengah, Anda dapat menggunakan rumus ini untuk masing-masing wilayah dan kemudian membandingkan persentase pertumbuhan ekonomi keduanya selama periode yang sama.

Data yang dirilis oleh BPS Kabupaten Brebes menunjukkan bahwa sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan menyumbang kontribusi terbesar terhadap pertumbuhan ekonomi wilayah tersebut,

mencapai 36,53%. Namun, data menunjukkan penurunan distribusi kontribusi sektor pertanian dari tahun ke tahun, menurun dari 40,41% pada tahun 2016 hingga mencapai 35,65% pada tahun 2019, sebelum meningkat sedikit menjadi 37,50% pada tahun 2020. Sementara sektor industri pengolahan memiliki distribusi sebesar 17,55%, sedangkan sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil, dan sepeda motor memiliki kontribusi sebesar 16,15%. Sektor lain menunjukkan variasi distribusi yang bervariasi antara 0,05 hingga 4,87%.

Meskipun Kabupaten Brebes memiliki lahan pertanian yang luas, data menunjukkan tren penurunan distribusi kontribusi pertanian terhadap perekonomian daerah. Hal ini mengisyaratkan adanya pergeseran lahan pertanian menjadi area industri, terlihat dari tren peningkatan distribusi pada sektor industri pengolahan. Di sisi lain, minat penduduk dalam sektor pertanian juga terus menurun, dengan banyak tenaga kerja memilih bekerja di sektor industri pengolahan atau beralih ke perantaraan di luar daerah.

HASIL DAN DISKUSI

Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Brebes tahun 2023-2026 terbentuk sebagai kelanjutan dari visi dan misi yang telah diusung dari tahap sebelumnya, yakni Rencana Jangka Panjang Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2005-2025. Sebagai kelanjutan yang mengacu pada kerangka waktu sebelumnya, Rencana Pembangunan Daerah pada periode ini menyuarakan tujuan pembangunan yang tertuang dalam visi untuk mewujudkan "Brebes yang Madani, Maju, dan Sejahtera." Terdapat konsistensi yang jelas dalam peningkatan, di mana sasaran pembangunan pada periode 2023-2026 memiliki keterkaitan langsung dengan

perwujudan visi jangka panjang. Tujuan dan sasaran yang dirumuskan dalam rencana pembangunan mengacu pada aspek kualitatif yang telah diusung sebelumnya, menegaskan keberlanjutan arah pembangunan menuju cita-cita masyarakat

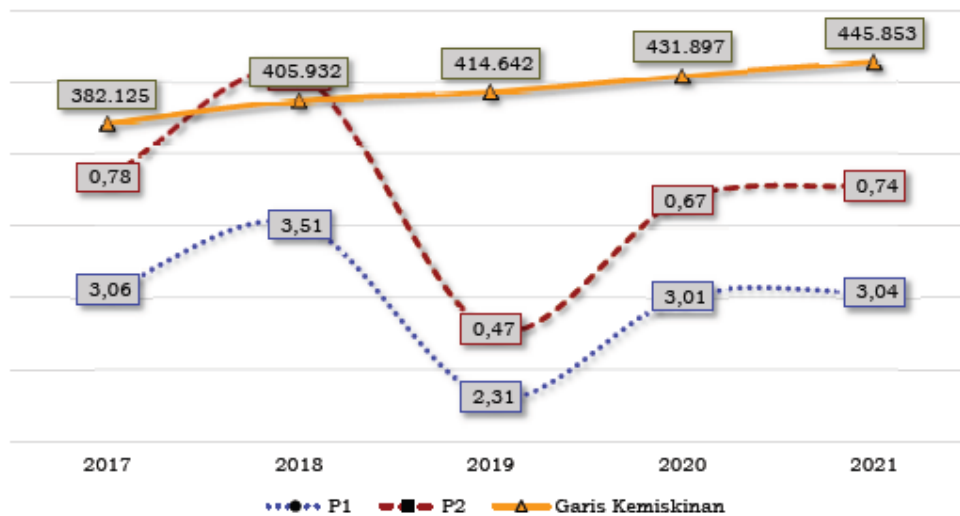
yang lebih madani, maju, dan sejahtera sesuai visi Rencana Jangka Panjang Daerah sebelumnya.

Tabel 1. Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Brebes 2017-2021 (%)

Lapangan Usaha	2017	2018	2019	2020	2021
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	1,75	2,43	0,64	3,91	0,35
Pertambangan dan Penggalian	6,72	6,04	3,84	1,38	3,4
Industri Pengolahan	15,68	15,81	16,73	16,83	17,55
Pengadaan Listrik dan Gas	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,05	0,05	0,05	0,06	0,06
Konstruksi	4,18	4,30	4,34	4,15	4,37
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	16,41	16,5	16,67	15,87	16,15
Transportasi dan Pergudangan	2,77	2,78	2,87	1,97	1,99
Informasi dan Komunikasi	3,19	3,39	3,58	3,95	3,81
Jasa Keuangan dan Asuransi	1,84	1,83	1,80	1,78	1,82
Real Estate	1,10	1,11	1,10	1,09	1,08
Jasa Perusahaan	0,27	0,29	0,3	0,29	0,29
Administrasi Pemerintah, Pertahanan, dan jaminan Sosial Wajib	2,11	2,07	2,00	1,96	1,85
Jasa Pendidikan	4,56	4,71	4,86	4,85	4,72
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,78	0,80	0,81	0,87	0,85
Jasa Lainnya	2,09	2,15	2,21	2,08	2,03
Produk Domestik Regional Bruto	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

Sumber: Badan Pusat Statistik Jawa Tengah (2022)

Gambar 1.
Perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1), Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) dan
Garis Kemiskinan di Kabupaten Brebes 2017-2021



Sumber: Badan Pusat Statistik Jawa Tengah (2022)

Hasil dan Diskusi

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Putri et al., (2023) di Kabupaten Brebes menyoroti pengaruh variabel kesehatan terhadap pertumbuhan ekonomi, dengan koefisien sebesar 5,399. Studi ini menggambarkan bahwa kesehatan memiliki dampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Brebes, terutama mengingat penyebaran pandemi Covid-19 pada awal tahun 2020 yang mempengaruhi kesehatan masyarakat secara keseluruhan.

Di sisi lain, penelitian yang dilakukan oleh Agustinus Maitulung, Anderson G. Kumenaung, (2023) membahas pengaruh pengeluaran pemerintah dan pendapatan asli daerah terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kepulauan Talaud. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa peningkatan pengeluaran pemerintah dan pendapatan asli daerah secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut.

Dalam konteks perbandingan, kedua penelitian menunjukkan fokus pada faktor-

faktor yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di tingkat daerah, meskipun terdapat perbedaan konteks antara Kabupaten Brebes dan Kabupaten Kepulauan Talaud. Di Kabupaten Brebes, kesehatan menjadi variabel dominan dalam pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi, sedangkan di Kabupaten Kepulauan Talaud, pengeluaran pemerintah dan pendapatan asli daerah menjadi variabel yang signifikan.

Kedua penelitian menunjukkan kompleksitas dalam faktor-faktor yang memengaruhi pertumbuhan ekonomi di daerah, dengan mempertimbangkan konteks sosial, ekonomi, dan kesehatan setempat. Perbandingan ini memberikan wawasan tambahan tentang beragam faktor yang dapat memengaruhi pertumbuhan ekonomi di tingkat lokal, memberikan landasan untuk perbandingan lebih lanjut atau adaptasi strategi pembangunan di daerah-daerah sejenis.

Hasil diskusi yang muncul menunjukkan bahwa Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Brebes

tahun 2023-2026 merupakan kesinambungan dan implementasi visi dan misi yang berasal dari tahap keempat Rencana Jangka Panjang Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2005-2025. Disusun dengan mempertimbangkan rencana-rencana pembangunan di tingkat nasional dan daerah, seperti RPJMN dan RPJMD Provinsi Jawa Tengah, serta berpedoman pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 yang mengatur penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah saat masa jabatan Kepala Daerahnya berakhir pada Tahun 2022. Visi "Brebes yang Madani, Maju, dan Sejahtera" menjadi landasan bagi pencapaian aspirasi masyarakat setempat dan diukur melalui kemadani, kemajuan, dan kesejahteraan. Penjelasan rinci tentang makna visi ini penting untuk menciptakan pemahaman bersama dan komitmen yang konsisten dari semua pihak yang terlibat.

Diskusi juga menggambarkan visi tersebut sebagai representasi daerah otonom yang memiliki wewenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan berdasarkan prakarsa dan aspirasi masyarakat, serta mencerminkan masyarakat "Madani" dengan nilai-nilai moral, agama, dan profesionalisme yang tinggi. Visi "Maju" diarahkan pada pengembangan sumber daya manusia dan kemandirian daerah, sementara visi "Sejahtera" menekankan pemenuhan kebutuhan materiil dan spiritual masyarakat. Diskusi menghasilkan pemahaman yang jelas tentang arah yang diinginkan dalam rencana pembangunan daerah, menegaskan upaya yang harus dilakukan untuk mencapai keberhasilan pembangunan di Kabupaten Brebes.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Putri et al., (2023) menunjukkan bahwa dampak sebenarnya dari Provinsi Banten terhadap pertumbuhan ekonomi diidentifikasi melalui variabel kesehatan,

dengan koefisien sebesar 5,399. Fokus pada kesehatan sebagai variabel dominan dapat dijelaskan oleh penyebaran pandemi Covid-19 pada awal tahun 2020 di seluruh Indonesia, termasuk Provinsi Banten. Kondisi ini mengakibatkan memburuknya tingkat kesehatan masyarakat dan berdampak pada penurunan tingkat pertumbuhan ekonomi dari tahun tersebut hingga saat ini.

Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh Agustinus Maitulung, Anderson G. Kumenaung, (2023) menyatakan bahwa variabel independen, yaitu pengeluaran pemerintah dan pendapatan asli daerah, secara bersama-sama atau simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel dependen, yaitu pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kepulauan Talaud. Hasil penelitian ini menekankan bahwa peningkatan pengeluaran pemerintah dan pendapatan asli daerah berpotensi meningkatkan pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut.

Dengan kata lain, penelitian Putri et al., (2023) menyoroti peran kesehatan dalam konteks pandemi Covid-19 terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Banten, sementara penelitian Agustinus Maitulung, Anderson G. Kumenaung, (2023) menekankan dampak positif pengeluaran pemerintah dan pendapatan asli daerah terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kepulauan Talaud.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan dari penelitian ini adalah Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2023-2026 terstruktur dengan jelas dalam tujuan dan sasarannya yang terinci, menggarisbawahi visi yang ingin dicapai dalam empat tahun ke depan. Dari upaya pencapaian tujuan tersebut, terlihat fokus pada beberapa aspek krusial, termasuk pemantapan nilai-nilai agama dan kearifan lokal, peningkatan kualitas sumber

daya manusia, pembangunan tata pemerintahan yang baik dan partisipatif, pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, peningkatan infrastruktur, pemanfaatan sumber daya alam dengan memperhatikan kelestarian lingkungan. Dari sasaran-sasaran yang terukur, program-program spesifik untuk memperkuat aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan telah dirumuskan dengan jelas, menekankan pentingnya partisipasi dan peran aktif masyarakat dalam proses pembangunan.

Rekomendasi berdasarkan struktur yang terperinci dalam rencana tersebut, disarankan untuk menjaga konsistensi dalam pelaksanaan rencana demi pencapaian tujuan yang diinginkan. Diperlukan kolaborasi yang erat antara pemerintah, lembaga, dan masyarakat guna melaksanakan program-program yang telah dirumuskan. Implementasi yang terarah dan terukur menjadi kunci dalam menjalankan rencana pembangunan, serta diperlukan pemantauan dan evaluasi berkala guna menjamin kesesuaian arah dan tujuan yang telah ditetapkan. Terpenting pula adalah memberdayakan masyarakat untuk turut serta dalam setiap inisiatif pembangunan, mengingat kesuksesan rencana ini sangat bergantung pada keterlibatan aktif mereka dalam setiap tahapan proses pelaksanaan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Setelah menyelesaikan penulisan makalah penelitian ini, saya ingin menyampaikan penghargaan kepada editor, rekan sejawat, teman, serta semua individu yang telah memberikan dukungan, informasi, tekanan, serta masukan dalam proses penulisan. Ucapan terima kasih saya untuk *reviewer*, kolega, dan semua pihak yang telah memberikan bantuan berupa saran dan kritik yang sangat berarti bagi penyusunan makalah ini. Terima kasih atas kontribusi dan dukungan yang telah

diberikan untuk membantu saya menyelesaikan makalah penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Azzaki, Muhammad Adnan. (2021). Pengaruh Perdagangan Internasional, dan Keterbukaan Ekonomi terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Negara-Negara Asean. *JEBIK : Jurnal Ekonomi Bisnis dan Kewirausahaan*. 10 (2), 154–174.
- Feliks Arfid Guampe, dkk. (2020). *Ekonomi Pembangunan (Strategi dan Kebijakan)* (No. 370/JB). CV. Media Sains Indonesia.
- Maitulung, Agustinus., Anderson G. Kumenaung, & Amran T. Naukoko. (2023). Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten Kepulauan Talaud. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisieni*, 23 (7), 145–156.
- Muhaemin, Nina Minawati. (2021). Bonus Demografi Jawa Barat Dan Perencanaan Pembangunan Daerah : Sudah Siapkah Jawa Barat?. *Jurnal Academia Praja*, 4 (1), 201–222.
<https://doi.org/10.36859/jap.v4i1.269>.
- Peraturan Bupati Brebes Nomor 18 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2023-2026.
- Priskila, Ella., & Alexandra Hukom. (2023). Evaluasi Kinerja Keuangan Daerah Melalui Analisis Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan

Daerah. *Jurnal Penelitian Ekonomi Manajemen Dan Bisnis (JEKOMBIS)*, 2 (2), 173 –183.
<https://doi.org/10.55606/jekombis.v2i2.1555>

Putri, Naura Amalia Asko., Fatimah Anggeraini., & Deris Desmawan. (2023). Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Banten. *JETISH : Journal of Education Technology Information Social Sciences and Health*, 1 (1), 64–70.
<https://doi.org/10.57235/jetish.v1i1.52>

Zakiah, Wiwin., Ahmad Rizani., Pratiwi Subianto., & Yudi Pungan. (2023). Identifikasi Potensi Unggulan Provinsi Kalimantan Tengah sebagai Dasar Perencanaan Pembangunan di Masa Depan. *Jurnal Ekonomi Integra*, 13 (1), 201–216.